

Misbakhun: Maluku Akan Tangguh Hadapi Krisis 2023

Suferi - PUBLIKBLITAR.COM

Dec 19, 2022 - 19:04



Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun

AMBON - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun optimistis Provinsi [Maluku](#) akan tangguh menghadapi krisis global tahun 2023 mendatang. Namun, ia memberikan catatan ketangguhan ini akan terwujud jika Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah saling bersinergi mengelola sumber daya di Provinsi [Maluku](#) secara tepat guna dan tepat sasaran.

“Saya masih sangat optimistis bahwa daya tahan masyarakat Indonesia, khususnya Provinsi [Maluku](#) ini resource base economy-nya jadi salah satu yang menopang daya tahan (untuk menghadapi krisis global 2023). Negara kita memiliki dua musim sehingga tidak memerlukan energi besar, lalu daya pangan dari produk lokal bisa diandalkan, dan sistem sosial kita yang saling bergotong-royong. Saya yakin Indonesia bisa bertahan,” ucap Misbakhun kepada Media di

sela-sela rangkaian Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi XI DPR RI ke Kota [Ambon](#), Provinsi [Maluku](#), Senin (19/12/2022).

Selain sumber daya alam, Politisi Fraksi Partai Golongan Karya (F-[Golkar](#)) itu berharap sumber daya manusia, terutama masyarakat yang berada di Provinsi [Maluku](#), bisa turut memberdayakan potensi daerah demi meningkatkan kesejahteraan bersama. Sehingga, pertumbuhan ekonomi Provinsi [Maluku](#) bisa diiringi dengan penekanan persentase tingkat kemiskinan yang kini sekitar 15 persen.

“Indonesia yang maju juga ditopang oleh [Maluku](#) yang maju. Jadi kemajuan itu yang saling melengkapi. Inilah harapan saya ke depan. Kemiskinan di [Maluku](#) menjadi salah satu yang tertinggi, walaupun sekarang ada hal yang sangat bagus yaitu pertumbuhan ekonomi [Maluku](#) itu dari atas pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu 6 persen,” tuturnya.

Memang, Misbakhun mengakui ada sejumlah tantangan yang kini dihadapi oleh Provinsi [Maluku](#). Di antaranya, masih minimnya masyarakat mengakses sektor pelayanan keuangan, infrastruktur yang belum memadai, dan teknologi yang belum merata. Terdiri dari 1.340 pulau yang terhubung oleh 92,4 persen lautan, baginya, harus ada sinergi yang baik antar stakeholder untuk menyelesaikan tantangan-tantangan ini.

“Nah, inilah yang menjadi tantangan sektor keuangan maka banyak yang bisa disumbangkan. Bagaimana masyarakat diberikan akses terhadap kredit-kredit usaha rakyat, kemudian kredit usaha rakyat sektoralnya seperti apa? Perlu dukungan infrastruktur dan teknologi juga. Lalu, sektor perikanan, sektor pertanian ini juga harus dikuatkan,” tandas Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu. (ts/rdn)